

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 6 No. 1 Tahun 2024

Pengarusutamaan Pembangunan Perdesaan dalam Kebijakan Nasional

Penulis

Setyardi Pratika Mulya¹ dan Ernan Rustiadi¹

¹ Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian, IPB University

Pengarusutamaan Pembangunan Perdesaan dalam Kebijakan Nasional

Isu Kunci

Policy Brief ini memuat poin-poin penting sebagai berikut:

- 1) Pengarusutamaan perdesaan masih minim belum menjadi fokus dalam muatan kebijakan pembangunan dan kebijakan ruang nasional.
- 2) Evaluasi perbandingan konteks perdesaan dalam kebijakan disajikan pada naskah ini.
- 3) Muatan dalam kebijakan nasional seharusnya tidak hanya mengurus masalah fisik saja, tapi memastikan ekosistem perdesaan tetap lestari
- 4) Operasionalisasi kebijakan pengelolaan wilayah perdesaan di Indonesia cenderung bias, karena secara konseptual berlaku istilah kawasan perdesaan, namun di lapangan sesuai batas administrasi.

Ringkasan

Indonesia merupakan negara agraris dengan ekosistem perdesaan yang masih relatif terjaga. Disisi lain, tekanan urbanisasi terhadap wilayah perdesaan semakin menguat. Di era desentralisasi kebijakan lokal dianggap sudah tidak lagi cukup sebagai instrumen pengelolaan kawasan perdesaan di sebagian negara. Oleh karena itu, seharusnya perspektif pengarusutamaan pembangunan perdesaan tersurat lebih kongkret dalam muatan kebijakan nasional. Konseptual kawasan perdesaan yang menjadi bagian kebijakan pemerintah Indonesia saat ini cenderung bias, karena operasionalisasi pengaturan di desa menggunakan batas administrasi. Rekomendasi kebijakan nasional yang pro-perdesaan dalam berbagai perspektif ekologi, ekonomi, sosial-budaya, dan tata kelola pemerintahan telah diusulkan.

Received : 1 March 2024
Revised : 18 April 2024
Accepted : 19 April 2024
Published : 22 April 2024



Copyright: © 2024 by the authors. License Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika – IPB University, Bogor, Indonesia. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

Pendahuluan

Di era desentralisasi kebijakan lokal dianggap sudah tidak lagi cukup sebagai instrumen pengelolaan kawasan perdesaan di sebagian negara (Li *et al.* 2019). Kebijakan perencanaan ruang yang membangun pusat-pusat pertumbuhan di perdesaan sering tidak terakomodir dalam perencanaan tata ruang konvensional yang umumnya berorientasi pada sistem perkotaan yang berkarakter “*urban bias*” (Rustiadi, 2023). Tulisan ini menunjukkan bahwa kebijakan nasional juga turut menjadi regulator dalam perlindungan terhadap kawasan perdesaan, jika diselaraskan dengan karakteristik wilayahnya. Selain itu, pengelolaan kawasan perdesaan harus diintegrasikan dengan perkembangan paradigma pembangunan perdesaan di lingkup global dengan diikuti trend kebijakan terkait (Randolph dan Storper 2023; Rustiadi *et al.* 2023).

Sebagian peneliti memandang penting untuk mempertahankan harmonisasi (lingkungan, sosial, ekonomi) di kawasan perdesaan, karena karakteristiknya yang khas dan memiliki dampak yang besar bagi wilayah regional. Berbagai regulasi telah dikeluarkan dalam konteks melindungi kawasan perdesaan, termasuk diantaranya sektor pertanian. Lanskap perdesaan memiliki kecenderungan kerentanan untuk berubah yang lebih tinggi dibandingkan perkotaan (Mulya *et al.* 2023). Mempertahankan lanskap dan situasi perdesaan tanpa mengabaikan kesejahteraan masyarakat disekitarnya merupakan konsep pembangunan yang belum teridentifikasi dengan baik. Secara jargon telah muncul berupa pandangan bahwa membangun perdesaan tidak selalu menjadikannya kota. Namun demikian, masih beragam bentuk dan interpretasi bagaimana hal itu dapat terjadi. Salah satu upaya dalam memahami situasi ini adalah munculnya konsep pengarusutamaan desa atau perdesaan. Pembahasan terkait pengarusutamaan desa atau perdesaan ini termasuk tema yang masih belum banyak dibahas oleh para peneliti, karena memiliki keragaman persepsi yang cukup tinggi.

Secara umum, isu strategis perdesaan di Indonesia adalah kesenjangan pelayanan dasar perdesaan-perkotaan, kemiskinan dan ketimpangan di perkotaan-perdesaan, lingkungan,

kondisi ekonomi perdesaan dan keterkaitan desa-kota (Bappenas 2023). Data empirik menunjukkan bahwa terjadinya kesenjangan pelayanan dasar perdesaan-perkotaan di Indonesia diindikasikan dengan hanya 84,93% penduduk perdesaan mendapatkan akses ke air minum layak dan <77% penduduk perdesaan mengakses sanitasi layak. Faktor lingkungan juga turut menjadi isu strategis di Indonesia karena 6,885 desa memiliki kerentanan tinggi terdampak krisis iklim. Isu selanjutnya adalah kondisi ekonomi perdesaan karena hampir 93% sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk desa/kelurahan berasal dari sektor primer (pertanian, pertambangan, dan sejenisnya), rata-rata pendapatan sektor pertanian di perdesaan berada di posisi terendah ketiga dibandingkan sektor lain (Bappenas 2023). Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 memproyeksi tenaga kerja di sektor pertanian dan sejenis akan menurun hingga seperlima di tahun 2045, dan hasil produksi pertanian juga diproyeksi menurun hingga 25% pada 2045 akibat perubahan iklim di sekitar perdesaan. Isu terakhir adalah keterkaitan desa-kota yang mendorong peningkatan laju urbanisasi di area perdesaan, terutama di wilayah Jawa-Bali, banyak desa yang berkarakteristik urban akibat pertumbuhan dan pembangunan (in situ urbanisasi), dan perdesaan sebagai kawasan pinggiran wilayah metropolitan adalah ruang fungsional yang belum memiliki entitas pengelola formal tetapi paling dinamis dan dominan perkembangannya.

Konsep pengarusutamaan desa dan perdesaan—yang umumnya dipahami sebagai situasi yang memperkuat atau mengarah—sangat berpengaruh dalam menggambarkan pengarusutamaan yang masih ada hubungannya dengan kebijakan (Bock 2015; Rao *et al.* 2020; Whitehorn *et al.* 2019). Daerah pedesaan dapat dicirikan berdasarkan parameter empiris, sosio-kultural atau spasial, atau melalui representasi sosial (Elands dan Wiersum 2001). Oleh karena itu, kami ingin melihat sejauh mana pengarusutamaan perdesaan dalam kebijakan nasional? Policy brief ini bertujuan mengembangkan serangkaian evaluasi pengarusutamaan desa dan perdesaan dalam kebijakan lokal (nasional) Indonesia.

Data

Data yang digunakan adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional, peraturan terkait perencanaan tata ruang nasional dan

undang-undang terkait (Undang-undang Desa) (Tabel 1).

Tabel 1 Data yang digunakan

No	Jenis data	Keterangan	Sumber
1	Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (versi Oktober 2023)	Dokumen perencanaan pembangunan	Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ¹
2	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional	Peraturan perencanaan tata ruang	Presiden Republik Indonesia ²
3	Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa	Peraturan perundang-undangan	Presiden Republik Indonesia ³

Kebijakan nasional terkait pembangunan pedesaan: Pembelajaran dari Indonesia

Hasil analisis konten dokumen RPJPN menunjukkan bahwa kebijakan ini dominan mengatur terkait aksi di lingkup desa dan perdesaan (Tabel 2). Aksi tersebut antara lain pelayanan dasar pedesaan, pendidikan di pedesaan, pelayanan pemerintahan desa, perluasan investasi pelayanan kesehatan dasar, organisasi dan penataan desa, ketahanan ekonomi pedesaan, diversifikasi kegiatan ekonomi, mitigasi risiko bencana di pedesaan, percepatan pembangunan desa, penyelarasan pembangunan desa, fasilitasi dan pemberdayaan desa. Aksi pemberdayaan desa menjadi kunci utama dalam pengarusutamaan perdesaan dalam kebijakan ini. Topik terkait pekerjaan, perilaku, lahan dan planning tidak diatur dalam RPJPN ini.

Selanjutnya, terkait desa dan perdesaan di kebijakan RTRWN memberikan gambaran bahwa regulasi ini mengatur lebih banyak terkait spasial (*place*). Dalam kebijakan ini, kawasan perdesaan termasuk diantaranya kawasan agropolitan, minapolitan dan transmigrasi. Kawasan transmigrasi ini hanya terdapat di Indonesia.

Selain dokumen perencanaan pembangunan dan spasial, di Indonesia juga terdapat undang-

undang yang mengatur khusus tentang desa. Terbitnya undang-undang ini juga menunjukkan pentingnya pengelolaan kawasan perdesaan di Indonesia. Berdasarkan analisis konten, UU Desa ini cukup komprehensif dibandingkan kebijakan lainnya.

Diakui, praktik desentralisasi di Indonesia mulai menunjukkan hasil positif dalam dua dekade terakhir, yang ditandai dengan tren penurunan disparitas wilayah dan fragmentasi spasial (Aritenang dan Chandramidi, 2023; Mulya *et al.* 2018). Penataan ulang kelembagaan telah menjadi aspek penting dalam menyelesaikan permasalahan regional dan, dengan demikian, meningkatkan pembangunan perdesaan (Talitha *et al.* 2020).

Selain itu, secara spesifik dapat dijelaskan bahwa untuk mengantisipasi rural decline perlu diversifikasi mata pencaharian pedesaan, pembentukan lembaga-lembaga yang berorientasi pasar dan modal sosial yang kuat dianggap dapat meningkatkan ketahanan pedesaan dan membangun komunitas pedesaan yang berkelanjutan (Li *et al.* 2019; Priatama *et al.* 2019). Terakhir, dibahas tiga kondisi untuk pembangunan pedesaan yang berkelanjutan dalam ekonomi pengetahuan: 1) pengembangan kegiatan ekonomi baru yang dapat merespons potensi permintaan perkotaan; 2) kewirausahaan lokal yang dapat membangun dan memperluas kegiatan-kegiatan

¹ <https://bappenas.go.id/id/berita/rancangan-akhir-rencana-pembangunan-jangka-panjang-nasional-2025-2045-YohFL>

² <https://peraturan.bpk.go.id/Details/51463>

³ https://www.dpr.go.id/dokidih/document/uu/UU_2014_6.pdf

baru tersebut; dan 3) modal sosial yang dapat mendukung kewirausahaan dalam kegiatan baru dengan akses terhadap kredit, tenaga kerja, sumber

daya manusia, pasar eksternal dan pengetahuan eksternal untuk pembelajaran dan inovasi (Li *et al.* 2019; Nasution *et al.* 2014).

Tabel 2 Hasil analisis konten terkait pembangunan perdesaan dalam kebijakan nasional

Topik	Dokumen perencanaan pembangunan		Peraturan tentang
	RPJPN	RTRWN	UU Desa
Aktor	Keluarga pedesaan (1), masyarakat desa (1)		Pemerintah desa (31), warga desa (6), masyarakat desa (adat) (44), tokoh masyarakat desa (1)
Behaviour			Lembaga Adat Desa (5), Adat Masyarakat Desa (1)
Methods	Rapat desa (1), digitalisasi pedesaan (1), desa pintar (1), “supra-desa” (1)		Musyawarah desa/antar desa (adat) (21), musyawarah desa (3), musyawarah perencanaan pembangunan desa (2), partisipasi masyarakat desa (3), tipe desa (2), pembentukan desa (adat) (6), pembentukan desa (5), peta desa (1), desa persiapan (3), kode desa (1), pemerintahan desa (1), hasil pemilihan kepala desa (1), pemberhentian kepala desa (3), sistem informasi pembangunan desa (6), data/pembangunan desa (2)
Populasi	Penduduk pedesaan (1)		
Faktor	Keterkaitan perdesaan-perkotaan (3)	Urbanisasi desa (1), keterkaitan desa-kota (1)	Kekayaan desa (15), aset desa (12), harta benda desa (2), daya saing desa (1), potensi desa (1), batas umur desa (1), batas desa (2), prasarana desa (3), desa pendapatan (7), pendapatan pemerintah desa (1), kepentingan desa (1), dana desa (4)
Sektor	Ekonomi pedesaan (1), elektabilitas (1), sosial ekonomi (1), lingkungan hidup (1), air minum (2)	Elektrifikasi (1), pemukiman (1), sosial budaya (1)	keuangan (11), anggaran pendapatan dan belanja (15), administrasi pemerintahan (1), sosial budaya dan adat istiadat (13), ekonomi (4), kelembagaan (2), lingkungan hidup (1), pembiayaan (2), infrastruktur (1).
Tempat	Daerah perdesaan dan afirmasi (2), Perdesaan (1), Transmigrasi (1)	Kawasan perdesaan (2), kawasan transmigrasi (1), kawasan agropolitan (1), kawasan minapolitan (1), kawasan pariwisata (1)	Kawasan pedesaan (6), desa adat (30), desa (74), pemukiman pedesaan (1), desa baru (1), wilayah desa (2), pasar desa (1), bangunan desa (2), milik desa hutan (1), mata air milik desa (1).
Aksi	Pelayanan dasar pedesaan (1), pendidikan di pedesaan (1), infrastruktur desa (1), pelayanan pemerintahan desa (1), perluasan investasi pelayanan kesehatan dasar		Badan Usaha Milik Desa (15), tugas, wewenang, hak dan kewajiban desa (6), penyelenggaraan pemerintahan desa (adat) (23), kepastian hukum desa (1), penetapan anggaran pendapatan dan belanja desa (1), kerjasama antar

Topik	Dokumen perencanaan pembangunan		Peraturan tentang
	RPJPN	RTRWN	UU Desa
	(1), organisasi dan penataan desa (2), ketahanan ekonomi pedesaan (1), diversifikasi kegiatan ekonomi (1), mitigasi risiko bencana di pedesaan (3), percepatan pembangunan desa (1), penyesuaian pembangunan desa (1), fasilitasi dan pemberdayaan desa (4)		desa (18), pendirian BUMDes (1), penambahan dan pelepasan aset desa (1), gotong royong di desa (1), berita desa (1), Lembaga Kemasyarakatan Desa (9), penggabungan desa (adat) (2), perjanjian antar desa (adat) (1)
Program	Peningkatan kapasitas pemerintahan desa (1), program pembangunan desa (1), pengelolaan urbanisasi pedesaan (1)	menjaga fungsi kawasan pedesaan (2)	Pemberdayaan masyarakat desa (adat) (21), bantuan sesuai permasalahan dan kebutuhan desa (1), pembinaan masyarakat desa (adat) (12), peraturan desa (2), penataan desa (adat) (6), pemberdayaan masyarakat desa kelembagaan (2), pelayanan kepada masyarakat desa (2), pelayanan usaha antar desa (1), program pemerintahan desa (1), program pengelolaan sumber daya desa prioritas (1), program pembangunan antar desa (1)
Perencanaan			Perencanaan desa (1), rencana investasi masuk desa (1), perencanaan pembangunan desa (4), rencana pembangunan kawasan pedesaan (1)
Pembangunan	Pembangunan desa (6), pembangunan kawasan pedesaan (1)	pengembangan kawasan perdesaan (2), pengembangan desa konservasi (1)	Pembangunan desa/wilayah/desa/antar desa (50), pelaksanaan pembangunan desa (adat) (8)
Kebijakan	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (1), Pemerintahan Desa (3), Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN) (1), Kebijakan Sesuai Kebutuhan Desa (1)		Peraturan desa (adat) (19), pemerintahan desa (1), perubahan status desa (4), kewenangan desa (adat) (7), rancangan peraturan desa (4), peraturan kepala desa/kepala desa (8), lembar desa (1), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (6), Rencana Pembangunan Tahunan Desa (1), Rencana Kerja Pemerintahan Desa (6), Rencana Tata Ruang Desa (1), Status Desa (1), Peradilan Desa Adat (1)
Kemiskinan	Pengentasan kemiskinan di pedesaan (1)		
Sasaran	Arah pembangunan desa (1), sentra produksi komoditas unggulan di pedesaan (3), kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pedesaan (2)	keseimbangan pembangunan perkotaan-pedesaan (1)	Kesejahteraan masyarakat desa (6), kesejahteraan masyarakat desa (1), ketentraman dan ketertiban desa (4), mutu hidup masyarakat desa (1), terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, dan situasi desa yang damai (1), kemajuan ekonomi dan pertanian

Topik	Dokumen perencanaan pembangunan		Peraturan tentang
	RPJPN	RTRWN	UU Desa
			masyarakat desa (1), kualitas pemerintahan dan masyarakat desa (1).

Rekomendasi

Selama ini, pengelolaan kawasan perdesaan yang terjadi saat ini menggunakan batas administrasi. Padahal secara teoritis, perspektif kawasan perdesaan adalah batas wilayah fungsional. Kami melihat operasionalisasi di Indonesia dalam pengelolaan wilayah cenderung bias. Oleh karena itu, kami berpendapat bahwa pembentukan kawasan perdesaan tidak efektif, cenderung hanya bersifat konseptual.

Kebijakan nasional pembangunan perdesaan lebih fokus pada aspek ekonomi. Walaupun otonomi desa sedang berlangsung, perspektif pengarusutamaan pembangunan perdesaan di setiap level kebijakan harus menjadi bagian tidak terpisahkan, tidak hanya di regulasi level lokal tetapi juga nasional. Kesinambungan kebijakan pengarusutamaan pembangunan perdesaan di setiap level mendorong kesejahteraan masyarakat desa.

Kebijakan desa tidak hanya mengatur aspek fisik saja, seperti penambahan infrastruktur namun juga menjaga ekosistem perdesaan tetap lestari. Kedepan wilayah perdesaan yang mempertahankan ciri khas perdesaan (pertanian, kearifan lokal, adat istiadat) dengan konektivitas (komunikasi, transportasi) yang mudah antar daerah diharapkan dapat menjadikan masyarakat desa lebih sejahtera.

Daftar Pustaka

- Aritenang, A. F., & Chandramidi, A. N. (2023). The spatial effects of fiscal decentralization on regional convergence: the case of regions in Indonesia. *GeoJournal*, 88(2), 2011–2030. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10724-2>
- Bappenas, D. of R. D. M. of N. D. P. (2023). *Village and Rural Area Development Policy in the Draft RPJMN 2025-2029*.
- Bock, B. B. (2015). Gender, Place & Culture: A Journal of Feminist Geography Gender mainstreaming and rural development policy; the trivialisation of rural gender issues. *Gender, Place and Culture*, 22(5), 731–745.
- Elands, B. H. M., & Wiersum, K. F. (2001). Forestry and rural development in Europe: An exploration of socio-political discourses. *Forest Policy and Economics*, 3(1–2), 5–16. [https://doi.org/10.1016/S1389-9341\(00\)00027-7](https://doi.org/10.1016/S1389-9341(00)00027-7)
- Li, Y., Westlund, H., & Liu, Y. (2019). Why some rural areas decline while some others not: An overview of rural evolution in the world. *Journal of Rural Studies*, 68(February), 135–143. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2019.03.003>
- Mulya, S. P., Putro, H. P. H., & Hudalah, D. (2023). Review of peri-urban agriculture as a regional ecosystem service. In *Geography and Sustainability*. Elsevier. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2666683923000329>
- Mulya, S. P., Rustiadi, E., & Pravitasari, A. E. (2018). Economic Disparities in West Java Based on Village Development Index. *Strengthening Regional and Local Economies*, 727.
- Nasution, A., Rustiadi, E., Juanda, B., & ... (2014). Dampak modal sosial terhadap kesejahteraan Rumah Tangga Perdesaan di Indonesia. *Mimbar: Jurnal Sosial* <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/593>
- Priatama, R. A., Onitsuka, K., Rustiadi, E., & Hoshino, S. (2019). Social interaction of Indonesian rural youths in the internet age. *Sustainability*. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/1/115>
- Randolph, G. F., & Storper, M. (2023). Is urbanisation in the Global South fundamentally different? Comparative global urban analysis for the 21st century. *Urban Studies*, 60(1), 3–25. <https://doi.org/10.1177/00420980211067926>
- Rao, C. S., Prasad, J. V. N. S., Choudhari, S. K., & Singh, A. K. (2020). Mainstreaming climate resilient villages in national programmes towards sustainability of agriculture and environment in India. *Climate Change and Environmental Sustainability*, 8(2), 116. <https://doi.org/10.5958/2320-642x.2020.00013.7>
- Rustiadi, E. (2023). *Reviews Regional and Rural Development Planning Based on Science and Spatial Information Technology*. www.lpb.ac.id. <https://ipb.ac.id/news/index/2023/06/prof-ernan-rustiadi-reviews-regional-and-rural-development-planning-based-on-science-and-spatial-information-technology/2b3b88d24f10296f9e2f3f1a1fdf47ca>
- Rustiadi, E., Pravitasari, A. E., Priatama, R. A., Singer, J., Junaidi, Zulgani, & Sholihah, R. I. (2023).

Regional Development, Rural Transformation, and Land Use/Cover Changes in a Fast-Growing Oil Palm Region: The Case of Jambi Province, Indonesia. *Land*, 12(1059). <https://doi.org/https://doi.org/10.3390/land12051059>

Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>

Whitehorn, P. R., Navarro, L. M., Schröter, M., Fernandez, M., Rotllan-Puig, X., & Marques, A. (2019). Mainstreaming biodiversity: A review of national strategies. *Biological Conservation*, 235(February), 157–163. <https://doi.org/10.1016/j.biocon.2019.04.016>



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Setyardi Pratika Mulya, Dosen Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, IPB University. Saat ini sedang menempuh Pendidikan Doktor di Program Studi Perencanaan Wilayah Kota, Sekolah Arsitektur Perencanaan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung (ITB). Selain pengajar juga sebagai peneliti di Pusat Pengkajian Perencanaan Pengembangan Wilayah (P4W) LPPM IPB. Minat dan bidang yang ditekuninya antara lain peri-urbanisasi (khususnya peri-urban agriculture), perencanaan penggunaan lahan, penataan ruang, evaluasi lahan (daya dukung lahan) untuk perencanaan wilayah/kawasan, serta analisis spasial (**Corresponding Author**). **E-mail: setyardi@apps.ipb.ac.id**



Ernan Rustiadi, Professor di Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, IPB University. Saat ini tengah menempati posisi sebagai Kepala Divisi Perencanaan Pengembangan Wilayah, Departemen Ilmu Tanah dan Sumberdaya Lahan, Fakultas Pertanian IPB dan Wakil Rektor IPB Bidang Riset, Inovasi dan Pengembangan Agromaritim (2023-sekarang). Ernan mempunyai minat dalam studi dan kajian terkait dengan perubahan penggunaan lahan, studi megacities, perencanaan perdesaan, aspek lingkungan hidup dan lensa sustainability dalam pengembangan wilayah, serta ekonomi wilayah.

ISSN 2828-285X



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680